



Njo Investasi  
Mayar Izine

DPMPSTSP MENUJU WBBM



**MAL PELAYAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**DPMPSTSP**  
**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**RENJA**  
**TAHUN 2024-2026**

**HUBUNGI KAMI :**



[dpmptsp.temanggungkab.go.id](http://dpmptsp.temanggungkab.go.id)



[dpmptsp.temanggungkab](https://www.instagram.com/dpmptsp.temanggungkab)



[dpm\\_temanggungkab](https://www.facebook.com/dpm_temanggungkab)

Jl. Jenderal Sudirman No.41-42, Temanggung



+62 851-8484-1817

**HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026**

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,  
Pada Tanggal : Juli 2026

Koordinator Bidang Ekonomi,  
Sumberdaya Alama, dan  
Infrastruktur,

Petugas Verifikator

ADI WIBOWO, SP.  
NIP. 198111012009031003

ARIYANTO PURWOKO SIWI, S.E.  
NIP. 199401222019031004

Mengetahui,  
KEPALA BAPPEDA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dr. HENDRA SUMARYANA, S.Sos., MT  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197203241992031003

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 telah disusun berdasarkan Indikasi Rencana Program Strategis Perencanaan Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2024.

Rencana Kerja ( Renja ) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan arah dan landasan berpijak bagi seluruh penyelenggara tugas – tugas pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.
2. Memberikan pedoman dan acuan ( guideline ) bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas – tugas penyelenggaraan pembangunan.
3. Merupakan petunjuk operasional bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih mikro yang diselenggarakan oleh segenap PD termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Semoga Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 bisa menjadi sebuah Dokumen Perencanaan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi penyelenggara tugas – tugas pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan amanat yang diemban oleh Kabupaten Temanggung dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temanggung, 30 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG,



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN VERIFIKASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU .....</b>	<b>12</b>
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026.....	12
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	20
2.3 Data Pokok .....	28
2.4 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .....	42
2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	44
2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	50
2.7 Inovasi Perangkat Daerah .....	50
2.8 Penghargaan .....	52
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN .....</b>	<b>53</b>
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	53
3.2 Tujuan dan Sasaran renja DPMPTSP .....	53
<b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....</b>	<b>56</b>
4.1 Program dan Kegiatan.....	56
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>77</b>

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu s.d Tahun 2024 ..... 13

TABEL 2.2 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2025 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung..... 21

TABEL 2.3 Realisasi Investasi Tahun 2020-2025 TW II ..... 28

TABEL 2.4 Persentase Kajian Teknis Investasi Tahun 2020-2025 ..... 29

TABEL 2.5 Persentase Perusahaan yang Bermitra Tahun 2020-2025 ..... 30

TABEL 2.6 Persentase Promosi Penanaman Modal Tahun 2020-2025..... 31

TABEL 2.7 Persentase Pelayanan Perizinan Elektronik Tahun 2020-2025 ..... 32

TABEL 2.8 Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu Tahun 2020-2025 ..... 33

TABEL 2.9 Persentase Pengaduan DPMPTSP terselesaikan Tahun 2020-2025..... 34

TABEL 2.10 Persentase Pengaduan OSS Tahun 2020-2025 ..... 34

TABEL 2.11 Rekap Pengaduan Tahun 2025 Triwulan II ..... 36

TABEL 2.12 Rekap Pengaduan OSS Tahun 2025 Triwulan II ..... 36

TABEL 2.13 Persentase Pengaduan DPMPTSP terselesaikan Tahun 2020-2025 ..... 37

TABEL 2.14 Persentase Pengaduan OSS Tahun 2020-2025 ..... 37

TABEL 2.15 Rekap Pengaduan Tahun 2025 Triwulan II ..... 39

TABEL 2.16 Rekap Pengaduan OSS Tahun 2025 Triwulan II ..... 39

TABEL 2.17 Persentase Perusahaan Tahun 2020-2025 ..... 41

TABEL 2.18 Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal Tahun 2020-2025 ..... 42

TABEL 2.19 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026..... 45

TABEL 2.20 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 50

TABEL 2.21 Daftar Inovasi Perangkat Daerah ..... 50

TABEL 2.22 Daftar Penghargaan Pemerintah DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2025 ..... 52

TABEL 3.1 Tujuan, Sasaran, indikator Sasaran, Target Kinerja  
DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..... 54

TABEL 3.2 Arah Kebijakan DPMPTSP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2026 ..... 55

TABEL 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP  
Kabupaten Temanggung Tahun 2026 ..... 57

TABEL 4.2 Daftar Program Prioritas DPMPTSP dalam Mendukung  
Program Bupati Tahun 2026 ..... 59

TABEL 4.3 Rencana Program dan Kegiatan DPMPTSP Kabupaten  
Temanggung Tahun 2026 ..... 62

**DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan ..... 2

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

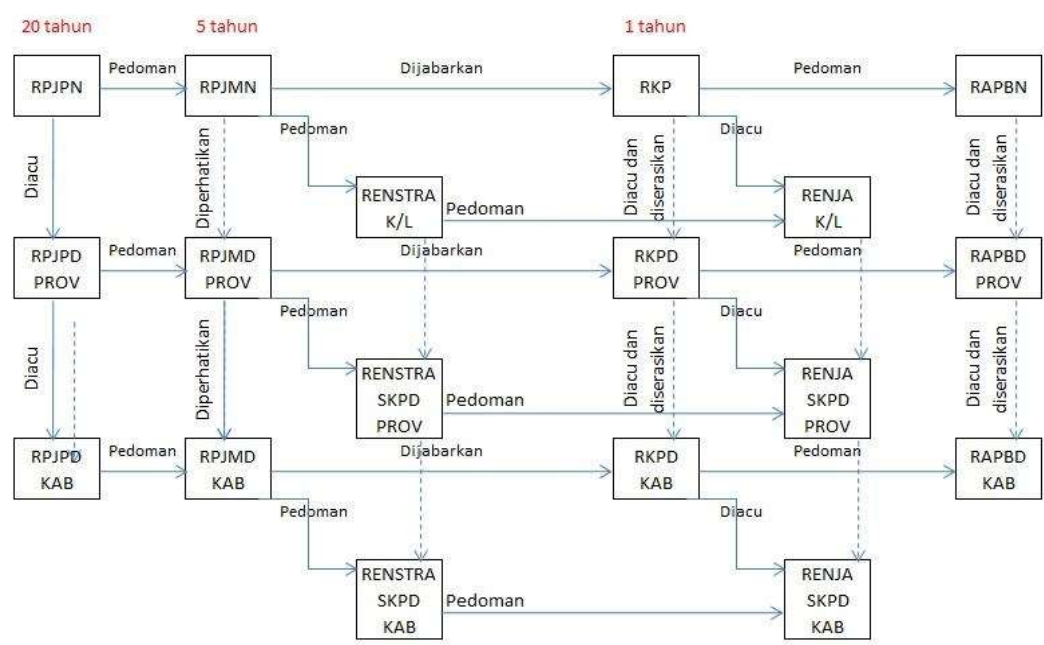
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2026 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2026.

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1  
**Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2026 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

**a. Pengolahan data dan informasi;**

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk kondisi tahun 2025-2029;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2025, dan realisasi tahun 2024 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2024;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**

*Review* hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

*Mereview* faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

*Review* capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

**d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya, serta capaian

kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

**e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;**

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**f. Perumusan tujuan dan sasaran;**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;**

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;**

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pembangunan daerah.

**i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

**j. Telaahan Kebijakan Nasional;**

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan

bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

**k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;**

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

**l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan**

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

**m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.**

Dokumen rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

## **1.2. Landasan Hukum**

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2029;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
  13. Peraturan Daerah Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka



- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
  18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
  20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
  21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2026 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama kurun waktu Tahun 2026;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2024 dan Triwulan II Tahun 2025 terhadap target di Tahun 2025.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2024 sebagai tahun ke-pertama pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
s.d Tahun 2024

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>Pertumbuhan Realisasi Investasi</b>	<b>%</b>	<b>3,5</b>		<b>2,5</b>			<b>4,8</b>		<b>4,8</b>	
<b>A</b>	<b>PENANAMAN MODAL</b>						<b>1.354.629.400</b>	<b>806.107.200</b>		<b>798.065.150</b>		
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>						<b>150.000.000</b>	<b>25.000.000</b>		<b>24.422.300</b>		<b>24.422.300</b>
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100		100			100		100	
		Persentase perusahaan yang bermitra	%	50		60			70		70	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/kota</b>											
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dokumen	1	60.300.500	1	20.000.000	0	1	0	1	0
<b>2</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>											
		Persentase promosi Penanaman modal	%	25		50			<b>75</b>			
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab.Kota</b>											
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen	1	180.901.500	1	60.000.000	7.000.000	<b>1</b>	6.957.200	1	6.957.200

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>						<b>409.629.400</b>	<b>407.907.200</b>		<b>404.497.489</b>		
		Persentase pelayanan perizinan secara elektronik	%	100		100			<b>100</b>	-	<b>100</b>	
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	100		100			<b>100</b>	-	<b>100</b>	
		Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Tertangani	%	100		100			<b>100</b>	-	<b>100</b>	
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>											
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha Yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pelaku Usaha	12.000	1.025.108.500	3.000	3.340.000.000	3.239.985.800	<b>10.783</b>		<b>10.783</b>	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Terselesaikannya Pengaduan dan Gugatan di Pengadilan	Pelaku Usaha	200	30.150.250	200	10.000.000	7.000.000	<b>176</b>		<b>176</b>	
4	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>											
		Persentase pengendalian penanaman modal	Persen	100		100			100	-	100	

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Pengdalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah/kabupaten</b>											
	Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Terlaksananya pemantauan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	15	180.901.500	10	50.000.000	102.774.000	149	96.555.250	149	96.555.250
	Bimbingan teknis kepada pelaku usaha	terlaksananya BIMTEK/ Sosialisasi Kemudahan Berusaha Berbasis Resiko	Pelaku Usaha	150	980.486.130	150	325.200.000	222.729.000	152	217.258.880	152	217.258.880
	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Pengawasan Penanaman Modal	Kegiatan Usaha	15	120.601.000	10	40.000.000	79.458.000	140	55.624.172	140	55.624.172
<b>5.</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>											
	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>											
	Pengelolaan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen	1	30.150.250	1	10.000.000		1		1	
<b>B</b>	<b>PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH</b>											
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>											
	<b>Administrasi Keuangan</b>											

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	264	6.831.082.125	216	2.265.680.094	2.129.933.220	216	2.081.446.072	216	2.081.446.072
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>											
	Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Orang	150	673.016.896	150	223.221.000	650.000.000	150	598.408.684	150	598.408.684
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>											
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	36	18.090.150	12	6.000.000	6.999.000	15	6.811.000	15	6.811.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	36	90.450.750	12	30.000.000	30.000.000	12	29.949.001	12	29.949.001
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan	Paket	36	90.450.750	12	30.000.000	30.000.000	12	29.709.250	12	29.709.250
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	420	105.525.875	140	35.000.000	35.000.000	140	34.843.250	140	34.843.250
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	36	90.450.750	12	30.000.000	33.735.000	12	32.880.511	12	32.880.511
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			13.567.613	12	4.500.000	740.000	12	725.000	12	725.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA, Listrik dan Internet			271.352.250	12	90.000.000	95.000.000	12	78.403.919	12	78.403.919

No	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024			REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Laporan	12	45.225.375	12	15.000.000	15.980.000	12	15.790.000	12	15.790.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	1.370.491.312	12	454.553.880	449.553.880	12	360.344.103	12	360.344.103
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>											
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	14	180.901.500	14	50.000.000	53.000.000	14	46.350.933	14	46.350.933
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	75.375.625	1	25.000.000	4.000.000	1	4.000.000	1	4.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit	1	60.300.500	1	20.000.000	15.000.000	1	14.734.000	1	14.734.000



Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2024 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
  - Meningkatnya laju investasi dan kualitas pelayanan publik
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
  - a. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan;
  - b. Persentase perusahaan yang bermitra;
  - c. Persentase promoso penanaman modal;
  - d. Persentase Pelayanan Perizinan secara elektronik;
  - e. Persentase pelayanan perizinan yang diterbitkan tepat waktu;
  - f. Persentase Pengaduan Masyarakat yang tertangani;
  - g. Persentase Pengendalian Penanaman Modal;
  - h. Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal.
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
  - a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota;
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

- d. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan;
  - e. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya;
  - f. Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha;
  - g. Pengawasan Penanaman Modal;
  - h. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi;
  - i. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - j. Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan;
  - k. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - l. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
  - m. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - n. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - o. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
  - p. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - q. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - r. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor;
  - s. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
  - t. Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan;
  - u. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - v. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
4. Tidak ada Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
  5. Tidak ada Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
  6. Tidak ada Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
  7. Tidak ada Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
- Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **100%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan;  
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan II tahun 2025 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2025 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

**2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)**

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.2  
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan II Tahun 2025 **(Laporan IKPD)**  
Kabupaten Temanggung

No.	Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Taret Kinerja Tahun 2025	
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah					
A. URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENANAMAN MODAL																						
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)																						
		1	Pertumbuhan realisasi investasi	%	n.a	2,5	3	3,5	4,83	-41,8		58,22				V		Pertumbuhan Investasi = Investasi tahun ini - investasi tahun lalu, dibagi investasi tahun lalu, kali 100%	Terbentuknya MPP dengan 132 layanan dan 12 inovasi	Lahan KPI yang masih tersedia berada dibelakang dan belum ada akses masuk	Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan kajian lahan KPI tersebut. Melaksanakan jemput bola OSS	
					Pembilang : Realisasi Investasi Daerah				2,145	1,286												
					Penyebut : Target Realisasi Investasi Daerah				2,097	2,209												
INDIKATOR PROGRAM																						
1	Program Penguatan Iklim Penanaman Modal	1	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan	%	100	100	100	100	100	100		100	V					Jumlah Informasi peluang usaha yang disediakan di bagi jumlah peluang usaha sektor unggulan di kali 100%	Tersedianya data pendukung peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Temanggung	Tidak tersedianya anggaran untuk membuat Kajian Potensi Investasi	Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu sektor unggulan di Kabupaten Temanggung	
				Pembilang : Jumlah Informasi peluang usaha				5	5													
				Penyebut : jumlah peluang usaha sektor unggulan				5	5													
		2	Persentase perusahaan yang bermitra	%	n.a	50	60	70	100	200		100	V					jumlah perusahaan yang bermitra dibagi jumlah perusahaan yang berkomitmen dikali seratus	Adanya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk bermitra dengan UMKM Kesadaran perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM cukup tinggi	Tidak tersedianya anggaran untuk melakukan fasilitasi kemitraan	Melakukan Koordinasi langsung dengan perusahaan besar untuk mendorong perusahaan bermitra dengan UMKM	
				Pembilang : jumlah perusahaan yang bermitra				1	2													
				Penyebut : jumlah perusahaan besar				1	1													

No.	Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Taret Kinerja Tahun 2026
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
2	Program Promosi Penan Modal	3	Persentase promosi penanaman modal	%	n.a	25	50	75	100	100		100	V					Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan dibagi jumlah event promosi yang diikuti	Terbentuknya MPP dengan 132 layanan dan 12 inovasi	Tidak tersedianya anggaran untuk pelaksanaa n kegiatan promosi penanama n modal, belum adanya I-Pro yang siap ditawarkan kepada investor	Akan melakukan promosi bersama pada CJIBF yang diselenggara kan oleh DPMTSP Prov. Jawa Tengah
				Pembilang : Jumlah Kegiatan Promosi					3	1											
				Penyebut : Jumlah event promosi yang harus diikuti					1	1											
3	Program Pelayanan Penanaman Modal	4	Persentase Pelayanan Perizinan Elektrokin	%	n.a	100	100	100	100	100		100	V					Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik di bagi dengan semua Perizinan yang masuk kali 100%	Adanya inovasi Jempol Boss dan Gampil yang mendukung proses pelaksanaan pelayanan perizinan	Adanya pemotongan anggaran untuk pelayanan perizinan, di satu sisi DPMTSP harus mem berikan layanan publik yang optimal dalam rang ka mening katkan kua litas layanan publik khususnya di bidang perizinan	Untuk laya Nan konsul tasi bisa di laksanakan secara online dan memaksimal kan call center melalui wa untuk pendam pingan layanan
				Pembilang : Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik					10.116	9,544											
				Penyebut : Semua Perizinan yang Masul					10.116	9,544											
		5	Persentase Perizina diterbitkan tepat W	%	100	100	100	100	100	100		100	V					Jumlah Izin yang diterbit kan tepat waktu dibagi jumlah	Adanya beberapa inovasi yang sangat mendukung	Kurang nya sosialisasi terkait regulasi yang ada di	Mengguna kan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi
				Pembilang : Perizinan yang terbit tepat waktu					10.959	9.544											
				Penyebut : Jumlah pengajuan perizinan					10.959	9.544											

No.	Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Taret Kinerja Tahun 202	
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah					
																		permohonan izin dikali 100%	proses pelayanan perizinan kepada masyarakat sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan izin usaha secara tepat waktu sesuai dengan SOP	dinas teknis (RTRW, PBG, Persetujuan Lingkungan, dan regulasi teknis lain nya) sehingga pelaku usaha belum men dapatkan gambaran mengenai proses perizinan	terkait regulasi baru di bidang perizinan yang bersifat teknis	
		6	Persentase Pengajuan Masyarakat yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100		100	V						Menggunakan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi terkait regulasi baru di bidang perizinan yang bersifat teknis	Adanya fasilitas layanan aduan di MPP yang memberikan kemudahan bagi masyarakat jika akan melakukan pengaduan	Tidak ada anggaran yang khusus untuk menangani aduan, biaya yang ada menggunakan kegiatan fasilitas layanan konsultasi perizinan	Mengguna Kan layanan aduan on line melalui google form,WA, email
				Pembilang : Jumlah pengaduan yang tertangani					176	1												
				Penyebut : Pengaduan Masyarakat					176	1												
4	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	7	Persentase Pengendalian Penanaman Modal	%	n.a	12	16	20	100	125		100	V					Jumlah perusahaan yang didampingi dalam melaksanakan LKPM dalam satu tahun / Jumlah Perusahaan Wajib LKPM * 100%	1. Adanya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan laporan LKPM 2. Kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM	Tidak tersedia nya anggaran pelaksanaan kegiatan pendamping an LKPM	Melakukan Pendamping an LKPM secara online	
				Pembilang : Jumlah Perusahaan yang didampingi dalam melaksanakan LKPM dalam satu tahun					149	15												
				Penyebut : Jumlah Perusahaan Wajib LKPM					149	12												

No.	Program	No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian 2025	Skala Nilai Peringkat Kinerja					Rumus	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Upaya Pencapaian Target Kinerja Tahun 2026
						2024	2025	2026	2024	2025	2026		Sangat	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah				
5	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	8	Persentase Pengelolaan dan Informasi Penanaman Modal	%	n.a	100	100	100	100	100		100						jumlah dokumen yang disajikan / jumlah dokumen data yang wajib disajikan dikali 100%	Tersedianya data di Sistem OSS-RBA	Sistem OSS-RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data	Menjalin koordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat terkait sistem OSS
JUMLAH IKUPD				1	RATA-RATA CAPAIAN IKUPD							58	0	0	0	1	0				
JUMLAH INDIKATOR PROGRAM				8	RATA-RATA CAPAIAN INDIKTOR PROGRAM							100	8	0	0	0	0				
JUMLAH TOTAL INDIKTOR PERANGKAT DAERAH				9	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH							79,11	8	0	0	1	0				
					KRETERIA PENILAIAN REALISASI							TINGGI									

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status Sangat Tinggi ada 8 terdiri dari:
  - a. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor unggulan.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya data pendukung peluang usaha sektor unggulan di Kabupaten Temanggung.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedianya anggaran untuk membuat Kajian Potensi Investasi baru'
    - 3) Upaya Pencapaian Target Kinerja indikator tersebut adalah melakukan koordinasi dengan PD pengampu sektor unggulan di Kabupaten Temanggung.
  - b. Persentase perusahaan yang bermitra.
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk bermitra dengan UMKM dan kesadaran perusahaan besar untuk bermitra dengan UMKM cukup tinggi.
    - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedianya anggaran untuk melakukan fasilitasi kemitraan.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi langsung dengan perusahaan besar untuk mendorong perusahaan bermitra dengan UMKM.
  - c. Pesentase Promosi Penanaman Modal
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terbentuknya MPP (Mal Pelayanan Perizinan) dengan 132 layanan dan 12 Inovasi
    - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal dan belum adanya I Pro yang siap ditawarkan kepada investor.
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan promosi bersama pada CJIBF yang diselenggarakan oleh DPMPSP Provinsi Jawa Tengah.
  - d. Persentase Pelayanan Perizinan secara Elektronik



- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya inovasi Jempol Boss dan Gampil yang mendukung proses pelaksanaan pelayanan perizinan.
  - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah adanya pemotongan anggaran untuk pelayanan perizinan, di satu sisi DPMPTSP harus memberikan layanan Publik yang optimal dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik khususnya di bidang perizinan.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah untuk layanan konsultasi bisa dilaksanakan secara online dan memaksimalkan call center melalui WA untuk pendampingan layanan.
- e. Persentase Perizinan yang diterbitkan tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya beberapa inovasi yang sangat mendukung proses pelayanan perizinan kepada masyarakat sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mendapatkan izin usaha secara tepat waktu sesuai dengan SOP.
  - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah kurangnya sosialisasi terkait regulasi yang ada di dinas teknis (RTRW, PBG, Persetujuan Lingkungan, dan regulasi teknis lainnya) sehingga pelaku usaha belum mendapatkan gambaran mengenai proses perizinan.
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menggunakan media sosial dalam pelaksanaan sosialisasi terkait regulasi baru di bidang perizinan yang bersifat teknis.
- f. Persentase Pengaduan masyarakat yang tertangani
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya fasilitas layanan aduan di MPP yang memberikan kemudahan bagi masyarakat jika akan melakukan pengaduan.
  - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah tidak ada anggaran yang khusus untuk menanggapi aduan dan biaya yang ada menggunakan kegiatan fasilitasi layanan konsultasi
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

menggunakan layanan aduan online melalui google form, WA, Email.

- g. Persentase Pengendalian Penanaman Modal
  - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk melakukan pelaporan LKPM dan kesadaran perusahaan untuk melaporkan LKPM.
  - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pendampingan LKPM
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendampingan LKPM secara Online.
- h. Persentase Pengolahan Data dan Informasi Penanaman Modal
  - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Tersedianya data di Sistem OSS-RBA
  - 2) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah Sistem OSS-RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data
  - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menjalinkan koordinasi secara aktif dengan pemerintah pusat terkait sistem
2. Capaian indikator dengan status Sangat rendah tidak ada.
3. Capaian indikator dengan status rendah ada 1 (satu) terdiri dari:
  - a. Pertumbuhan realisasi investasi
    - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah terbentuknya MPP dengan 1332 layanan dengan 12 inovasi.
    - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah lahan KPI yang masih tersedia berada dibelakang dan belum memiliki akses masuk
    - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi dengan PD terkait untuk melakukan kajian lahan KPI dan melaksanakan kegiatan Jemput Bola OSS.

2.3. Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Penanaman Modal dan Data Pokok Bidang Perizinan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Data Pokok Bidang Penanaman Modal
  - a. Pertumbuhan Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah nilai modal yang dipergunakan investor dalam menanamkan usahanya di berbagai bidang usaha terbuka yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Ruang Lingkup realisasi investasi meliputi realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Rumus nilai investasi pada tahun berjalan adalah penjumlahan dari realisasi investasi bidang usaha baru di tahun yang bersangkutan

**Tabel 2.3**  
**Realisasi Investasi Tahun 2020-2025 TW II**  
**(Dalam Milyar)**

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Nilai investasi tahun berjalan	1.245	1.496	1.836	2.046	2.145	94
2	Nilai investasi PMDN	1.2456	1.486	1.529	1.326	1.923	1,191
3	Nilai investasi PMA	-	10	306	719	221	1.286

Sumber : OSS.go.id

- b. Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan  
Definisi : tersedianya informasi untuk masyarakat dunia usaha terkait dengan peluang investasi yang ada di Kabupaten Temanggung.  
Ruang Lingkup : Sektor Pariwisata, sektor UMKM, sektor Pertanian, Perkebunan, sektor peternakan dan sektor perikanan.  
Rumus Persentase Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor Unggulan adalah :

Jumlah Informasi peluang usaha yang disediakan

X 100%

Jumlah peluang usaha sektor unggulan

Untuk indikator persentase tersedianya informasi peluang usaha/ sektor bidang unggulan di tahun 2020 masih 60 % tersedia yaitu bidang Pariwisata, UMKM dan Pertanian, sedangkan pada tahun 2021 belum ada penambahan informasi peluang usaha di karenakan keterbatasan anggaran. Pada tahun 2023 hingga tahun 2025 Triwulan II jumlah peluang usaha yang sudah diinformasikan sudah 100 % dari jumlah Peluang usaha yang ada.

**Tabel 2.4**  
**Persentase Kajian Teknis Investasi**  
**Tahun 2020-2025**

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah informasi yang disediakan	3	3	5	5	5	5
2	Jumlah peluang usaha sektor unggulan	5	5	5	5	5	5
	<b>Persentase</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan II

c. Persentase Perusahaan yang Bermitra

Perekonomian daerah yang semakin kuat berbasis pada ekonomi kerakyatan, potensi sektor unggulan daerah, dan cluster usaha tingkat pedesaan dalam rangka meningkatkan daya saing dan kemandirian daerah perlu ditunjang dengan kemitraan antara usaha Mikro, Kecil , dan Menengah di daerah dengan kekerjasama dengan perusahaan besar yang ada didaerah.

Tujuan dilaksanakan kemitraan adalah sebagai berikut :

- a. mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah dalam peningkatan perekonomian di daerah;
- b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah untuk berkolaborasi dengan Usaha Besar baik dari dalam maupun luar negeri;

- c. mendorong bertumbuhnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah yang masuk dalam rantai pasok bagi penguatan nilai tambah dan basis produksi di dalam negeri;
- d. menjaga kepastian dan keberlangsungan usaha yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di daerah.

Wujud Kerjasama adalah memberikan fasilitasi dengan koordinasi dengan dinas terkait (Dindagkop Kabupaten Temanggung) terkait dengan data UMK yang telah lengkap memiliki izin seperti NIB, SPPIRT, Halal. Langkah berikut memilih produk makanan terkait kualitas produk, kemasan dan perizinan. Setelah itu membantu pelaku usaha UMK untuk memasarkan poduknya dengan pihak ke tiga. Sejak tahun 2023 pihak ketiga yang dipilih adalah dari perusahaan besar di kabupaten Temanggung Lariz swalayan dan Mahkota Swalayan. Produk yang telah lolos uji kualitas dan perizinan akan dipasarkan oleh pihak ketiga tersebut.

Rumus presentase perusahaan yang bermitra adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang bermitra}}{\text{Jumlah perusahaan yang berkomitmen}} \times 100\%$$

**Tabel 2.5**  
**Persentase Perusahaan Yang Bermitra**  
**Tahun 2020-2025**

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Yang Bermitra	n.a	n.a	2	2	1	2
2	Jumlah Perusahaan Yang berkomitmen	n.a	n.a	2	2	1	1
	Persentase	n.a	n.a	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II (data diolah)

d. Persentase Promosi Penanaman Modal

Promosi penanaman modal merupakan salah satu program dan kegiatan bidang penanaman modal yang meliputi analisis potensi investasi, perencanaan strategi promosi, pengembangan materi promosi, partisipasi dalam acara promosi, pelayanan informasi dan

kerjasama dengan pihak eksternal. Tujuan dari kegiatan promosi adalah untuk meningkatkan realisasi investasi. Rumus Presentase Promosi Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Promosi yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah event promosi yang harus diikuti}} \times 100\%$$

**Tabel 2.6**  
**Persentase Promosi Penanaman Modal**  
**Tahun 2020-2025**

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 TW II
1	Jumlah Promosi yang diikuti	1	3	8	3	3	1
2	Jumlah Event Promosi yang harus diikuti	1	1	1	1	1	1
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II (data diolah)

Dari tabel diatas dapat dianalisa bahwa *Event* Promosi yang mengikuti dari tahun 2020 – 2025 melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Pada tahun 2020 kegiatan Promosi tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal dikarenakan adanya wabah “Virus Corona”, untuk memutus rantai penyebaran virus tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan *Social* dan *Phisycal Distancing*, sehingga kegiatan yang melibatkan orang banyak tidak diperbolehkan. Kegiatan Promosi pada tahun 2025 disamping melalui event-event, prososi juga dilaksanakan melalu media sosial yang ada.

2. Data Pokok Bidang Perizinan

a. Persentase Pelayanan Perizinan Secara Elektronik

Pelayanan perizinan secara elektronik adalah sistem yang memudahkan proses pengajuan, pengolahan, dan penerbitan izin melalui aplikasi. Pelayanan perizinan secara elektronik merupakan langkah maju dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan pelayanan publik menjadi lebih responsif dan akuntabel.

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) adalah perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.

Ruang lingkup indikator ini meliputi data perizinan dan non perizinan dan Perizinan yang sifatnya komersial.Rumus indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Perizinan secara Elektronik}}{\text{Semua Perizinan yang masuk}} \times 100\%$$

**Tabel 2.7**  
**Persentase Pelayanan Perizinan Elektronik**  
**Tahun 2020-2025**

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah permohonan Elektronik yang terlayani	6.023	10.124	11.566	13.781	10.959	9.988
2	jumlah permohonan Elektronik yang masuk	6.575	10.124	11.791	13.781	10.959	9.988
	Persentase	91,60	100	98,09	100	100	100

Sumber : OSS.go.id, simbg.go.id, sicantik.go.id, mppd

Dari data diatas persentase pelayanan perizinan Elektronik pada tahun 2020 sebesar 91,60%. Kecenderungan perizinan Elektronik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 meningkat karena selain perizinan berusaha yang melalui OSS juga ada perizinan selain izin berusaha yaitu melalui aplikasi Simbg, MPPD dan *sicantik cloud* yang terus diusahakan penyempurnaan aplikasinya dengan tahapan pembuatan format izin yang belum pernah diterbitkan bisa dilayani secara elektronik.

Pada tahun 2021 data perizinan elektronik Dinas Penanaman Modal dan Peyanan Terpadu Satu Pintu yang terlayani sudah mencapai 100 %. Hal ini dikarenakan setiap pengajuan perizinan secara elektronik langsung terlayani oleh sistem.

Data dukung untuk indikator ini adalah data pemohon secara elektronik dan data keseluruhan permohonan izin.

Untuk tahun 2022 data perizinan eletronik sebanyak 11.566 dari keseluruhan izin sebanyak 11.791 atau sebesar 98,09 %.

Untuk tahun 2023 data perizinan elektronik sebanyak 13.781 dari keseluruhan izin sebanyak 13.781 atau sebesar 100%.

Tahun 2024 data perizinan elektronik sebanyak 10.959 dari keseluruhan izin sebanyak 10.959 atau sebesar 100%.

Tahun 2025 data perizinan elektronik triwulan II permohonan yang terbit sebanyak 9.988 dari keseluruhan pengajuan atau sebesar 100%.

b. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu

Definisi dari penyelesaian perijinan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dengan prosedur dan syarat-syaratnya.

Ruang lingkup indikator ini adalah semua pemohon ijin sifatnya komersial dan non komersial.

Rumusnya adalah jumlah perizinan yang diterbitkan tepat waktu dibagi jumlah permohonan izin yang diterbitkan dikali 100.

**Tabel 2.8**  
**Persentase Perizinan Yang Diterbitkan Tepat Waktu**  
**Tahun 2020-2025**  
d.

NO	URAIAN	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Izin tepat waktu	6091	10.294	11,791	13.781	10.959	10.959
2	Jumlah permohonan izin yang diterbitkan	6575	10.294	11,791	13.781	10.959	10.959
3	Persentase	92,64	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan I

c. Persentase Pengaduan Masyarakat yang terselesaikan

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.



Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparatur pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidak sesuaian standar proses perizinan atau ketidak sesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan.

Jumlah pengaduan yang tertangani

Jumlah Pengaduan Masyarakat

X 100%

Tabel 2.9  
Persentase Pengaduan DPMPTSP terselesaikan  
Tahun 2020-2025  
d.

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	12	12	4	3	6	1
2	Jumlah Pengaduan	12	12	4	3	6	1
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II

Tabel 2.10  
Persentase Pengaduan OSS  
Tahun 2020-2025  
e.

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	n.a	n.a	n.a	n.a	170	20

2	Jumlah Pengaduan	n.a	n.a	n.a	n.a	170	20
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber : Oss.go.id

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Peyanan Terpadu Satu Pintu dan Peyanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan. Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPMPTSP kabupaten temanggung. Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPMPTSP membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang

jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan. pada tahun 2021 pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan, pada tahun 2022 aduan yang masuk sejumlah 4 pengaduan, Sedangkan pada tahun 2023 pada 6 Pengaduan. Sedangkan di tahun 2024 pengaduan yang masuk sejumlah 6 pengaduan yang masuk dan semuanya tertangani.

Data Rekap pengaduan DPMPSTSP dan OSS tahun 2025 triwulan II yang masuk dan tertangani dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.11**  
**Rekap Pengaduan**  
**Tahun 2025 Triwulan II**

No	Bulan	Jumlah Aduan	Jumlah Aduan Tertangani	Ket
1	Januari	1	1	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	1	1	

Sumber : DPMPSTSP 2025 triwulan II

**Tabel 2.12**  
**Rekap Pengaduan OSS**  
**Tahun 2025 Triwulan II**

No	Bulan	Jumlah Aduan	Jumlah Aduan Tertangani	Ket
1	Januari	20	20	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	20	20	

Sumber : DPMPSTSP 2025 triwulan II

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan sarana pengaduan untuk penanganan pengaduan pelayanan publik dan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberi tugas kepada petugas

penanganan yang kompeten untuk melaksanakan fungsi pengelolaan pengaduan.

Pengaduan Masyarakat adalah bentuk dari sebuah pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada aparaturnya pemerintah, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun. Pengaduan dapat dilakukan oleh setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya ketidaksesuaian standar proses perizinan atau ketidaksesuaian komitmen Pelaku usaha terhadap izin yang sudah dikeluarkan oleh DPMPTSP. Pengaduan masyarakat dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung antara lain melalui surat aduan, kotak aduan, melalui website DPMPTSP, dan sms gateway. DPMPTSP telah membentuk Tim Penanganan Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Temanggung Tahun 2018 melalui Surat Keputusan Bupati Temanggung Nomor 034 Tahun 2018.

Ruang lingkup data ini adalah pengelolaan aduan.

Jumlah pengaduan yang tertangani

Jumlah Pengaduan Masyarakat

X 100%

Tabel 2.13  
Persentase Pengaduan DPMPTSP terselesaikan  
Tahun 2020-2025  
f.

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	12	12	4	3	6	1
2	Jumlah Pengaduan	12	12	4	3	6	1
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP 2024 triwulan IV

Tabel 2.14  
Persentase Pengaduan OSS  
Tahun 2020-2025  
g.

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Pengaduan terselesaikan	n.a	n.a	n.a	n.a	170	20

2	Jumlah Pengaduan	n.a	n.a	n.a	n.a	170	20
	Persentase	n.a	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber : Oss.go.id

Pada Tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung melakukan pembenahan dan melengkapi sarana dan prasarana pengaduan dengan membuat Ruang Pengaduan, menetapkan petugas penanganan pengaduan, membuat SOP Pengaduan, menerapkan system pengaduan secara langsung maupun tidak langsung, secara online dan secara offline, kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait perbaikan system pengaduan.

Sehingga pada tahun 2018 terdapat data pengaduan yang masuk ke DPMPTSP Kabupaten Temanggung sejumlah 34 pengaduan masyarakat. Menurut Pengaduan masyarakat yang masuk pada Tahun 2018, prosentase terbesar adalah terkait dengan pelanggaran pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang sudah mendapatkan izin atau belum mendapatkan izin dari DPMPTSP Kabupaten Temanggung, bukan dari kualitas pelayanan perizinan yang dilaksanakan oleh petugas pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Temanggung.

Sejumlah 34 Pengaduan yang masuk ke DPMPTSP semuanya sudah diselesaikan dalam kurun waktu tahun yang sama. DPMPTSP membentuk Tim Penanganan pengaduan melalui Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari Gabungan OPD yang ada di Pemerintah Kabupaten Temanggung, sehingga penyelesaian Pengaduan masyarakat dapat segera terselesaikan oleh tim penanganan pengaduan. Melihat jumlah pengaduan pada tahun yang masuk pada Tahun 2018 sangat signifikan bila dibandingkan dengan 2017, hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi keberhasilan perubahan dan penambahan sarana prasarana, dan sistem pada lembaga pelayanan publik di Kabupaten Temanggung, sehingga masyarakat bisa dengan mudah dan berani melakukan pengaduan masyarakat.

Pada Tahun 2019 Pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut sudah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan yang tertuang dalam berita acara penanganan pengaduan. Pada tahun 2019 Tim Penanganan Pengaduan juga sudah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Temanggung sehingga Pengelolaan pengaduan di Kabupaten Temanggung sudah mempunyai standar dan prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan. Prosedur dan standar pengelolaan pengaduan.

Pada tahun 2020 jumlah aduan yang masuk 12 pengaduan dan aduan tersebut dapat diselesaikan. pada tahun 2021 pengaduan di Kabupaten Temanggung yang masuk sejumlah 12 pengaduan dan pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh tim penanganan pengaduan, pada tahun 2022 aduan yang masuk sejumlah 4 pengaduan, Sedangkan pada tahun 2023 pada 6 Pengaduan. Sedangkan di tahun 2024 pengaduan yang masuk sejumlah 6 pengaduan yang masuk dan semuanya tertangani. Data Rekap pengaduan DPMPTSP dan OSS tahun 2025 triwulan II yang masuk dan tertangani dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.15**  
**Rekap Pengaduan**  
**Tahun 2025 Triwulan II**

No	Bulan	Jumlah Aduan	Jumlah Aduan Tertangani	Ket
1	Januari	1	1	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	1	1	

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II

**Tabel 2.16**  
**Rekap Pengaduan OSS**  
**Tahun 2025 Triwulan II**

No	Bulan	Jumlah Aduan	Jumlah Aduan Tertangani	Ket
1	Januari	20	20	
2	Februari	-	-	
3	Maret	-	-	
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	20	20	

Sumber : DPMPTSP 2025 triwulan II

**e. Persentase Pengendalian Penanaman Modal**

Pengendalian Penanaman Modal adalah proses pengawasan dan pengaturan investasi yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait untuk memastikan bahwa investasi yang masuk ke suatu negara atau daerah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Tujuan dari pengendalian ini meliputi:

- 1. **Mendorong Investasi yang Berkualitas:** Memastikan bahwa investasi yang masuk dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang positif.
- 2. **Meminimalkan Risiko:** Mengidentifikasi dan mengelola risiko yang mungkin timbul dari investasi, seperti dampak lingkungan atau sosial.
- 3. **Mematuhi Regulasi:** Memastikan bahwa semua investasi mematuhi hukum dan peraturan yang ada, termasuk perizinan dan ketentuan perpajakan.
- 4. **Meningkatkan Transparansi:** Mendorong keterbukaan dalam proses investasi untuk meningkatkan kepercayaan investor.
- 5. **Mendukung Pembangunan Berkelanjutan:** Mengarahkan investasi ke sektor-sektor yang mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan Penanaman modal bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten dapat langsung melakukan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan DPMPTSP Provinsi dan menyampaikan hasilnya kepada DPMPTSP provinsi.

Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan terhadap Perizinan Berusaha yang diterbitkan melalui sistem OSS dan/atau Perizinan yang diterbitkan melalui SPIPISE.

Kewenangan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota atas kegiatan usaha PMDN yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, yaitu yang ruang lingkup kegiatannya di daerah kabupaten/kota;

Rumus Presentase Pengendalian Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang didampingi dalam melaksanakan LKPM dalam satu tahun}}{\text{Jumlah Perusahaan Wajib LKPM}} \times 100$$

Tabel 2.17  
Persentase Perusahaan  
Tahun 2020-2025

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Perusahaan yang didampingi	n.a	n.a	n.a	n.a	149	15
2	Jumlah Perusahaan Wajib LKPM	n.a	n.a	n.a	n.a	12	12
	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPSTP 2024 triwulan IV

f. Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah proses yang melibatkan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran data terkait investasi. Tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi investasi yang berkualitas. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pengelolaan data dan informasi penanaman modal:

- Pengumpulan Data:** Mengumpulkan data yang relevan mengenai proyek investasi, termasuk informasi tentang investor, sektor industri, lokasi, dan dampak ekonomi.
- Pengolahan Data:** Memproses dan menganalisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ini termasuk pemanfaatan teknologi informasi untuk mempermudah pengolahan data.
- Penyimpanan Data:** Mengelola database yang terstruktur dengan baik agar data dapat diakses dengan mudah. Keamanan data juga menjadi perhatian penting untuk melindungi informasi sensitif.
- Penyebaran Informasi:** Membagikan informasi kepada stakeholder, termasuk pemerintah, investor, dan masyarakat umum. Ini dapat dilakukan melalui laporan, situs web, dan platform lainnya.
- Pemantauan dan Evaluasi:** Mengawasi perkembangan investasi dan mengevaluasi dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat. Data yang diperoleh dapat digunakan untuk perbaikan kebijakan investasi di masa depan.
- Kerjasama Lintas Sektor:** Mengintegrasikan data dari berbagai sumber, seperti kementerian, lembaga pemerintah, dan sektor swasta, untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap tentang penanaman modal.



Dengan pengelolaan yang efektif, data dan informasi penanaman modal dapat menjadi alat yang kuat untuk mendorong investasi yang berkelanjutan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Rumus Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal adalah :

$$\frac{\text{Jumlah dokumen data yang disajikan}}{\text{Jumlah dokumen data yang wajib disajikan}} \times 100$$

**Tabel 2.18**  
**Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal**  
**Tahun 2020-2025**

No	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025 (TW II)
1	Jumlah Data Yang Disajikan	n.a	1	1	1	1	1
2	Jumlah Data Yang Wajib Disajikan	n.a	1	1	1	1	1
	Persentase	n.a	100	100	100	100	100

Sumber : DPMPTSP data diolah tahun 2025 TW II

Dari tabel diatas pengelolaan data dan informasi penanaman modal sejak tahun 2021 hingga 2025 tersedia 1 (satu) data yaitu Sistem OSS-RBA.

**2.4 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari 8 indikator terdapat indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
  - Indikator Pertumbuhan realisasi investasi

Hal ini disebabkan karena baru diukur dalam triwulan II dan investasi akan tercapai bahkan melebihi target saat memasuki triwulan IV.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, antara lain :

- Lahan KPI yang masih tersedia berada di belakang dan belum ada sarana dan prasarana terutama akses jalan masuk;
- Kajian potensi investasi masih kurang saat ini baru ada 5 kajian potensi investasi;
- Belum dapat melaksanakan fasilitasi kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar dikarenakan belum tersedia anggaran;
- Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan promosi penanaman modal masih sangat sedikit sehingga promosi investasi belum maksimal;
- Belum ada I-Pro yang siap ditawarkan kepada investor;
- Adanya pemotongan anggaran untuk pelayanan perizinan, sehingga pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kualitas layanan;
- Kurangnya sosialisasi terkait regulasi yang ada di dinas teknis (RTRW, PBG, Persetujuan Lingkungan, dan regulasi teknis lainnya) sehingga pelaku usaha belum mendapatkan gambaran mengenai proses perizinan;
- Sistem OSS-RBA yang belum stabil sehingga terkendala pada saat melakukan akses data.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- Berkoordinasi dengan OPD terkait untuk melakukan kajian lahan KPI tersebut;
- Melaksanakan jemput bola OSS;
- Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu sektor unggulan di Kabupaten Temanggung;
- Melakukan koordinasi langsung dengan perusahaan besar untuk mendorong perusahaan bermitra dengan UMKM;

- Menggunakan media sosial dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak teranggarkan atau minim anggaran.

## **2.5 Review terhadap rancangan awal RKPD**

*Review* atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD tidak terdapat penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.15 berikut:

Tabel 2.19  
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2026

RANCANGAN AWAL RKPD 2026								RANCANGAN AWAL RKPD 2026 (HASIL ANALISIS KEBUTUHAN)							KE T
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		N O	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7		1	2	3	4	5	6	7	
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL								URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah			2.345.666.263			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Keuangan Daerah			2.345.666.263	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	17	Orang/bulan	2.345.666.263			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	17	Orang/bulan	2.345.666.263	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			150.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	150.000.000			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300	Orang	150.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.365.500			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah			111.365.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6.365.500			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6.365.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	25.000.000			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60	Paket	25.000.000	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	75	Paket	25.000.000			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaanyang Disediakan	75	Paket	25.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	25.000.000			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	25.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	30.000.000			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	30.000.000	
4	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>458.860.000</b>			<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>556.756.335</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	500.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	150.000.000			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	130.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	25.000.000			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	25.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	268.360.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	401.256.335	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>15.000.000</b>			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>604.995.500</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	15.000.000			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	604.995.500	
5	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>100.000.000</b>			<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>95.000.000</b>	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	Unit	80.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Temanggung	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13	Unit	75.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	Unit	15.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Gedung Kantor	1	Unit	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	182	Unit	5.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Temanggung	Terpeliharanya Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	182	Unit	15.000.000	
B	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi</b>	<b>92</b>	<b>%</b>	<b>6.000.000</b>			<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi</b>	<b>92</b>	<b>%</b>	<b>100.000.000</b>	
	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>		<b>Tersediannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>			<b>6.000.000</b>			<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>		<b>Tersediannya Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>			<b>100.000.000</b>	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen	6.000.000			Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1	Dokumen	20.000.000	
	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>	<b>Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>			<b>-</b>			<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>	<b>Jumlah Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>			<b>80.000.000</b>	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang UsahaKabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan PeluangUsaha Kabupaten/Kota			<b>-</b>			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang UsahaKabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Peta Potensi Investasi dan PeluangUsaha Kabupaten/Kota	1	Dokumen	80.000.000	
C	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>92</b>	<b>%</b>	<b>500.000.000</b>			<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			<b>92</b>	<b>%</b>	<b>700.000.000</b>	
1	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>					<b>500.000.000</b>			<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>					<b>700.000.000</b>	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	500.000.000			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1	Dokumen	400.000.000	

	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota					Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	Kabupaten Temanggung	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kabupaten/kota	1	Dokumen	300.000.000	
D	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bebas Calo</b>	<b>92</b>	<b>%</b>	<b>212.000.000</b>		<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>92</b>	<b>%</b>	<b>212.000.000</b>	
1	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>212.000.000</b>		<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>	<b>Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>			<b>212.000.000</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	Kabupaten Temanggung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	1	Dokumen	20.000.000		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	Kabupaten Temanggung	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitasi/ Insentif Daerah	1	Dokumen	20.000.000	
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000	Pelaku Usaha	212.000.000		Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2000	Pelaku Usaha	182.000.000	
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Pelaku Usaha	10.000.000		Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kabupaten Temanggung	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100	Pelaku Usaha	10.000.000	
E	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Kabupaten Temanggung</b>	<b>Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal</b>	<b>92</b>	<b>%</b>	<b>100.000.000</b>		<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			<b>92</b>	<b>%</b>	<b>99.000.000</b>	

	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			100.000.000			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			99.000.000	
	Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kabupaten Temanggung	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5	Kegiatan usaha	10.000.000			Penyelesaian Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	5	Kegiatan usaha	10.000.000	
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	Pelaku USaha	60.000.000			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80	Pelaku USaha	60.000.000	
	Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Temanggung	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50	Kegiatan Usaha	30.000.000			Pengawasan Penanaman Modal	Kabupaten Temanggung	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	50	Kegiatan Usaha	29.000.000	
	<b>JUMLAH</b>					<b>3.833.891.763</b>			<b>JUMLAH</b>					<b>4.974.783.598</b>	

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.



2.6 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Tidak ada usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Namun dalam proses ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.20  
Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
			N I H I L		

2.7 Inovasi Perangkat Daerah

Guna mendukung pencapaian Indiktor Kinerja selama kurun waktu tahun 2024-2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membuat 14 ( empat belas) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.21  
Daftar Inovasi Perangkat Daerah  
2024-2025

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN
1.	JEMPOL BOSS	Kegiatan pembuatan NIB untuk pelaku usaha UMKM terutama di luar Kecamatan Temanggung untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan izin usaha (NIB)
2.	KARPARK	Memastikan pemohon yang datang ke kantor DPMPTSP Kabupaten Temanggung mendapatkan kartu parkir agar pemohon lebih nyaman dan tenang saat melakukan pelayanan di DPMPTSP Kabupaten Temanggung
3.	QR CODE PBG	Plakat Persetujuan Bangunan Gedung yang diterbitkan DPMPTSP tidak lagi diketik secara

NO.	NAMA INOVASI	KETERANGAN
		manual terkait data bangunan gedungnya, melainkan sudah menggunakan QR CODE untuk mempermudah pengawasan bangunan gedung
4.	NGOBRAS (Ngobrol Santai)	Obrolan santai kemajuan kinerja pegawai DPMPTSP untuk menumbuhkan rasa persaudaraan yang tinggi dan meningkatkan kinerja semua pegawai
5.	SIBARENG (Sistem Informasi Pembayaran Retribusi Bangunan Gedung)	pembayaran untuk membantu proses pembayaran retribusi PBG dengan kode bayar yang dikirim ke akun SIMBG pemohon secara langsung
6.	TUAN KAMI (Waktu Anda Kami Hargai)	Pelayanan Penambahan 1 KBLI di OSS-RBA khusus untuk UMK hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit
7.	LAPOR BU! (Layanan Pendampingan OSS RBA Badan Usaha)	Membantu pelaku usaha dengan melakukan pendampingan pembuatan NIB khusus Badan Usaha setiap hari Selasa dan Kamis
8.	BOSUKMA (Barcode Survey Kepuasan Masyarakat)	Mempermudah masyarakat dalam memberikan penilaian kepada DPMPTSP dengan memberikan barcode SKM di meja pelayanan.
9.	CAKITAS (Catatan kaki Integritas)	Membubuhi <i>footnote</i> atau catatan kaki untuk seluruh surat keluar yang menginformasikan bahwa “Pegawai DPMPTSP Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas tidak menerima/meminta gratifikasi dan suap”
10.	LAZOOM	Layanan Via Zoom Pelayanan 24/7 bagi masyarakat untuk layanan konsultasi secara daring melalui aplikasi ZOOM
11.	24/7	Pelayanan Selain Jam Kerja Via Whatsapp
12.	LAYANAN MULTIHHELIX	Layanan Permohonan Izin tanpa turun dari kendaraan (Latatur/Layanan Tanpa Turun)
13.	SIAP TANAM	Aksi Pendampingan Penanaman Modal
14.	GAMPIL	Gerakan Pendampingan Pelayanan Perizinan
15.	SIPITE	Sistem Informasi Potensi Investasi Kabuten Temanggung
16.	SIPDEG	Sistem Presensi dengan GPS
17.	POP-INVEST	Pesan Otomatis Promosi Investasi Temanggung
18.	RETALiate	Rekap Data Online dan Terintegrasi
19.	OME GOOD	One Minute Education Good
20.	Si KOALA	Solusi Kolaboatif untuk Sinkronisasi Data Reklame

2.8 Penghargaan

Selama kurun waktu tahun 2024-2025, Penghargaan yang telah diterima oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22  
Daftar Penghargaan Pemerintah DPMPSTP Kabupaten Temanggung  
Tahun 2024-2025

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Tahun Perolehan
1.	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kementrian Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokari	Nasional	2024
2.	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Nilai : 95,40 ( Kualitas Tertinggi)	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	Nasional	2024
3.	Peringkat 13 Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Kementerian Ivestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal	Nasional	2024
4.	Juara I KRENOVA	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2024
5.	Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2024
6.	Peringkat 13 Nasional Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB)	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2024
7.	Wilayah Bebas Korupsi (WBK)	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2024
8	Peringkat I KRENOVA Kategori Perangkat Daerah	Kabupaten Temanggung	Kabupaten	2025
9	Peringkat III KRENOVA Kategori ASN	Kabupaen Temanggung	Kabupaten	2025
8	Top 10 IDEA Jateng 2025 (GAMPIL)	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	2025
9	Top 10 IDEA Jateng 2025 (JEMPOL BOSS)	Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	2025
10	Finalis KIPP Tingkat Nasional 2025 (JEMPOL BOSS)	Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi	Nasional	2025

### BAB III

## TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2025-2029 adalah “MENINGKATKAN IKLIM REALISASI INVESTASI DAN KUALITAS PELAYANAN MPP (MAL PELAYANAN PUBLIK)” dengan sasaran yang akan dicapai adalah “MENINGKATNYA REALISASI INVESTASI, MENINGKATKAN SISTEM LAYANAN DI MAL PELAYANAN PUBLIK, DAN MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH DALAM PELAYANAN PUBLIK”. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, maka untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut diperlukan:

1. Dukungan kesesuaian program dan kegiatan yang disusun dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
2. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2026 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
3. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.

Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten  
Temanggung Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2026	TARGET KONDIS I AKHIR 2030
Meningkatnya Realisasi Investasi PMA, PMDN dan Pelayanan MPP (Mal Pelayanan Publik)			Jumlah Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Milyar	2.150	2.162
	Meningkatnya Proyek Investasi		Jumlah Proyek Investasi PMA dan PMDN	Proyek		5.060
	Meningkatnya Jumlah Layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)		Persentase layanan yang memenuhi standar waktu pelayanan	Persen	90	98
			Peningkatan Jumlah Jenis Layanan di MPP	Layanan	1	3
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi Total terhadap Target Investasi	Persen	94	98
		Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal	Persen	94	98
		Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non berizinan Bebas Calo	Persen	94	98
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Persen	92	98

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2025-2029.

Kebijakan dan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Hal tersebut sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029.

Tabel 3.2.  
Arah Kebijakan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

No.	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	UPAYA YANG DILAKUKAN
1	Diversifikasi Perekonomi untuk penghidupan yang stabil	Pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor perekonomian	Peningkatan Investasi	Peningkatan investasi sektor strategi dengan memberikan kemudahan perizinan dan Promosi Peluang Investasi kepada Investor
			Peningkatan jumlah layanan di Mal Pelayanan Publik (Mal Pelayanan Perizinan)	Menambah jumlah layanan di MPP sebanyak 1 jenis layanan

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

#### **4.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung di Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2026 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2026.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.  
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung Tahun 2026

RANCANGAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+/-)
No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
<b>A.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>A.</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		<b>1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>a</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>a</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.666.263		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.345.666.263	-
<b>b</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>b</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150.000.000	-
<b>c</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>c</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.365.500		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.365.500	-
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	25.000.000	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.000.000	-
<b>d</b>	<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Pengadaan Sarana prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	604.995.500		Pengadaan Sarana prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan Lainnya	604.995.500	
<b>e</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>d</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.000.000	-
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.256.335		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	401.256.335	-
<b>f</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>e</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	75.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.000.000	-
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		<b>2</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>		



RANCANGAN RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2026		
No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
<b>a</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000
<b>b</b>	<b>Pembuatan Peta Potens Investasi Kabupaten/Kota</b>	
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	80.000.000
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	
<b>a</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	300.000.000
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	
<b>a</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20.000.000
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	182.000.000
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	
<b>a</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10.000.000
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	60.000.000
	Pengawasan Penanaman Modal	29.000.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.974.783.598</b>

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2026

RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2026			(+/-)
No.	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
<b>a</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>		
	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	20.000.000	-
<b>b</b>	<b>Pembuatan Peta Potens Investasi Kabupaten/Kota</b>		
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	80.000.000	
<b>3</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>		
<b>a</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>		
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	400.000.000	
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/kota	300.000.000	-
<b>4</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>		
<b>a</b>	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	20.000.000	-
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	182.000.000	-
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000	-
<b>5</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		
<b>a</b>	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	10.000.000	-
	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	60.000.000	-
	Pengawasan Penanaman Modal	29.000.000	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.974.783.598</b>	

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2026.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, Bupati Temanggung menetapkan **Peningkatan Jumlah Layanan Perizinan di Mal Pelayanan Publik (MPP)** sebagai salah satu program prioritas tahun 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk menciptakan iklim investasi yang inklusif, mempercepat pelayanan perizinan, serta mendorong keterlibatan multipihak dalam pembangunan daerah.

Mal Pelayanan Publik tidak hanya menjadi pusat layanan administratif, tetapi juga dioptimalkan sebagai pintu masuk strategis untuk meningkatkan promosi investasi, pemberdayaan UMKM, dan penguatan identitas ekonomi lokal Temanggung. Untuk mendukung prioritas tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan beberapa inisiatif utama yang dapat dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Daftar Program Prioritas DPMPTSP Dalam Mendukung Program Bupati Tahun 2026

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peningkatan jumlah layanan perizinan di Mal Pelayanan Publik	Peningkatan jumlah jenis layanan perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu di MPP Kabupaten Temanggung	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan Pelayanan Perzinan	Tahun 2026 1. Layanan DPMPTSP 8 jenis  2. Layanan MPP 132 jenis  Anggaran Rp. 150.000.000,-

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	
2	Promosi dan menjaring Multipihak dalam kerjasama pembangunan	Peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung.	<p>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanama Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>	Tahun 2026 Rp. 325,000,000,-
3	Penyelenggaraan Forum Promosi dan Investasi Secara Reguler	Peningkatan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung.	<p>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanama Modal Daerah Kabupaten/Kota</p>	Tahun 2026 Rp. 155,000,000,-

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pengembangan Brand Temanggung sebagai Pusat Tembakau & Kopi	Meningkatnya Pendapatan Petani dan Pelaku Usaha dengan Kenaikan harga jual hasil tembakau dan kopi seiring dengan peningkatan permintaan melalui strategi promosi yang dilaksanakan.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tahun 2026  Rp. 300.000.000
6	Menjaring Investasi yang berkontribusi dalam pengembangan UMKM	Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan UMKM dan lapangan kerja	Kegiatan Kemitraan Usaha Nasional  Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Tahun 2026  Rp. 20.000.000

Tabel 4.3  
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Temanggung  
Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional 1	Daerah				
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
						Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			4.974.783.598,00								4.933.580.939,00
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.974.783.598,00							4.933.580.939,00	
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			4.974.783.598,00							4.933.580.939,00	
1	2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	3.863.783.598,00						-	3.482.480.939,00	
	2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2.345.666.263,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	2.580.232.889,00	
	2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	2.345.666.263,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		2.580.232.889,00
	2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	150.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	165.000.000,00
	2	18	01	2.05	0010	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu										
							Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	300 Orang	150.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBHCHT	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		165.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional 1	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	111.365.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	122.502.050,00		
	2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	6.365.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		7.002.050,00		
	2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor												
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	25.000.000,00	-	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		27.500.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	1	01	2.0	000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan												
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	25.000.000,00	-	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		27.500.000,00		
	2	1	01	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000,00	-	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		27.500.000,00		
	2	1	01	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	30.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-		33.000.000,00		



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													program prioritas			
	2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	604.995.500,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	16.500.000,00
	2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		1 Unit	604.995.500,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		16.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional 1	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	556.756.335,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	488.246.000,00
	2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	500.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		550.000,00
	2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	130.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		165.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	18	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Laporan	25.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		27.500.000,00		
	2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	401.256.335,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		295.196.000,00		
	2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	95.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	110.000.000,00		

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional 1	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	1	01	2.0	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	75.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		88.000.000,00
	2	1	01	2.0	000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya										
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	15.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		16.500.000,00
	2	1	01	2.0	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya										
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap	-		5.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional 1	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
													program prioritas			
2	2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	-	-	100.000.000,00						-	94.600.000,00
	2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		-	20.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	6.600.000,00
	2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		6.600.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-	80.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	88.000.000,00
	2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		0,00
	2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		88.000.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional 1	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	persentase promosi penanaman modal	75 %	700.000.000,00						-	900.000.000,00
	2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Promosi yang diikuti	1 Kegiatan	700.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	900.000.000,00
	2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota										
							Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		550.000.000,00
	2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota										
							Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen	300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	-	-		350.000.000,00
4	2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	-	212.000.000,00						-	346.500.000,00

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-	212.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	346.500.000,00
	2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah										
							Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		22.000.000,00
	2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik										
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	2000 Pelaku Usaha	182.000.000,00	-	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		313.500.000,00



No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027			
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)		
												Nasional	Daerah					
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko												
							Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	100 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		11.000.000,00		
5	2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	99.000.000,00						-	110.000.000,00		
	2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	99.000.000,00			-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-	-	110.000.000,00		
	2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya												

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
												Nasional	Daerah			
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	5 Kegiatan Usaha.	10.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		11.000.000,00
	2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha										
							Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	80 Pelaku Usaha	60.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan DinamisPenguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		66.000.000,00
	2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal										

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif (Rp)	
												Nasional 1				Daerah
1	2					3	4	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			300				Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	50 Kegiatan Usaha	29.000.000,00	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU	-	Penguatan Landasan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas Dan Dinamis Penguatan reformasi birokrasi dan roadmap program prioritas	-		33.000.000,00
	J U M L A H								4.974.783.598,00							4.933.580.939,00

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Sebagai kesimpulan dari Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2026, dapat disampaikan beberapa hal penting:

**1. Keselarasan dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2026**

RENJA DPMPTSP telah dirancang untuk mendukung visi dan misi pembangunan Kabupaten Temanggung periode 2025–2029, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan investasi, perizinan, dan pelayanan terpadu satu pintu yang lebih efektif, efisien, transparan, dan terjangkau. Dokumen ini selaras dengan isu strategis yang telah ditetapkan dalam RKPD 2026;

**2. Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Daerah**

Pelaksanaan program dan kegiatan DPMPTSP yang termuat dalam RENJA diharapkan mampu mendukung tercapainya tujuan strategis Kabupaten Temanggung, yaitu: terwujudnya masyarakat berkualitas dan berdaya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas dari praktik KKN;

**3. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Investasi**

Dengan penerapan sistem perizinan berbasis elektronik (OSS), One-Stop Service yang lebih responsif, serta kemitraan strategis dengan dunia usaha dan masyarakat, RENJA ini mendorong percepatan investasi dan kewirausahaan lokal, sekaligus mempermudah UMKM untuk berdaya saing serta mengangkat perekonomian lokal yang inklusif.

**4. Sinergi dengan Stakeholder dan Lintas Sektor**

Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan—mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, OPD perangkat daerah, akademisi, sektor swasta, hingga komunitas lokal—telah menjadi bagian penting dalam penyusunan RENJA ini. Proses Musrenbang hingga Forum Perangkat Daerah memastikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan lintas sektor pembangunan.

**5. Komitmen Terhadap Evaluasi, Pengendalian, dan Perbaikan Berkelanjutan**

RENJA ini dilengkapi dengan indikator kinerja dan target operasional yang jelas, serta mekanisme evaluasi berkala dan audit

internal. Komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi menjadi bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan mendapat kepercayaan publik.

Dengan demikian, RENJA DPMPTSP Kabupaten Temanggung Tahun 2026 terintegrasi secara kuat dengan arah pembangunan daerah dan ditujukan agar seluruh program dan kegiatan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Temanggung.

Harapan kami semoga RENJA ini menjadi acuan kerja yang kokoh bagi seluruh jajaran DPMPTSP dalam menyediakan layanan publik yang prima, mendukung iklim investasi yang kondusif, dan memperkuat pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Bersama seluruh *stakeholder*, mari wujudkan **TEMANGGUNG UNTUK SEMUA, SEJAHTERA, BERKELANJUTAN, MUDAH, INKLUSIF, DAN AMAN** melalui sinergi dan inovasi dalam pelayanan publik.

Temanggung, 30 Juli 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
DWI SUKARMEI, ST., MT  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740608 200312 1 008